



ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR BERAS DI INDONESIA DALAM KERANGKA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Sudarto¹, Muhtadin²

Correspondensi e-mail: sudarto@gmmail.com

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Karanganyar

ABSTRACT

This study aims to analyze the substance and implementation of Indonesia's rice import policy within the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs), focusing on Central Java Province as one of the country's major rice-producing regions. The research employed a qualitative approach using policy analysis. Data were collected through the examination of national policy documents, statistical reports, and in-depth interviews with regional stakeholders. The analysis applied content analysis and thematic analysis based on SDG indicators, particularly SDG 2 (Zero Hunger), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), and SDG 12 (Responsible Consumption and Production). The findings indicate that rice import policies play a significant role in maintaining national food supply stability and controlling price fluctuations, particularly during periods of domestic production decline. However, their implementation in Central Java presents challenges, especially regarding the synchronization of import timing with harvest seasons and the protection of farmers' welfare. Overall, while the policy aligns with food supply stability objectives, stronger integration of long-term sustainability principles is required to support a resilient and inclusive food system.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi dan implementasi kebijakan impor beras di Indonesia dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan fokus pada Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu sentra produksi padi nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan (*policy analysis*). Data diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan nasional, laporan statistik, serta wawancara dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah. Analisis dilakukan menggunakan teknik *content analysis* dan analisis tematik dengan mengacu pada indikator SDG 2 (Zero Hunger), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), dan SDG 12

ARTICLE INFO

Submitted: 30 January 2024

Revised: 7 February 2024

Accepted: 15 February 2024

Keywords:

Rice import policy; food security; sustainable development; SDGs, Central Java.

DOI:

10.55080/agronimal.v2i1.1895

(Responsible Consumption and Production). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan impor beras berperan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, terutama saat terjadi penurunan produksi domestik. Namun demikian, implementasinya di Jawa Tengah sebagai daerah produsen menunjukkan tantangan dalam sinkronisasi waktu impor dengan musim panen serta perlindungan kesejahteraan petani. Secara keseluruhan, kebijakan impor beras telah selaras dengan aspek stabilitas pangan, tetapi masih memerlukan penguatan integrasi keberlanjutan jangka panjang untuk mendukung sistem pangan yang resilien dan inklusif.

Kata kunci:

Kebijakan impor beras;
ketahanan pangan;
pembangunan berkelanjutan;
SDGs, Jawa Tengah.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam konteks pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama Tujuan 2 (*Zero Hunger*). Beras sebagai komoditas pangan pokok mayoritas masyarakat Indonesia memiliki posisi sentral dalam kebijakan pangan nasional. Namun demikian, dinamika produksi domestik yang fluktuatif serta tekanan faktor eksternal seperti perubahan iklim dan gangguan rantai pasok global mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan impor beras sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), volume impor beras Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir sebagai respons terhadap penurunan produksi akibat anomali cuaca dan El Niño. Kondisi ini memunculkan perdebatan antara kebutuhan stabilisasi pangan dan perlindungan petani domestik.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kebijakan impor beras tidak hanya dipandang sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan dimensi sosial dan lingkungan. SDGs menekankan pentingnya sistem pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan resilien (United Nations, 2022). Oleh karena itu, kebijakan impor beras perlu dianalisis dalam kerangka keberlanjutan, mencakup aspek ketahanan pangan (SDG 2), pertumbuhan ekonomi inklusif (SDG 8), serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12). Sachs et al. (2023) menegaskan bahwa kebijakan pangan yang tidak terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan berpotensi menciptakan ketergantungan struktural dan melemahkan kemandirian produksi domestik dalam jangka panjang.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung padi nasional memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Data BPS Provinsi Jawa Tengah (2023) menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan salah satu kontributor utama produksi padi nasional, dengan ribuan hektare lahan pertanian produktif yang menopang kebutuhan pangan regional dan nasional. Namun demikian, kebijakan impor beras di tingkat nasional berdampak langsung terhadap stabilitas harga gabah di tingkat petani daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan impor beras berpotensi menekan harga gabah dan memengaruhi kesejahteraan petani (Fauzi & Oxtavianus, 2021). Hal ini menjadi isu penting dalam konteks keberlanjutan ekonomi lokal dan perlindungan petani sebagai aktor utama sistem pangan.

Meskipun berbagai studi telah mengkaji dampak ekonomi impor beras terhadap harga dan produksi domestik, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada analisis kuantitatif ekonomi dan belum banyak yang menelaah kebijakan impor beras dalam perspektif kerangka SDGs secara komprehensif. Riset terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek stabilisasi harga dan neraca perdagangan, sementara dimensi keberlanjutan seperti implikasi terhadap kedaulatan pangan, keberlanjutan produksi pertanian, dan keseimbangan sosial-ekonomi petani masih relatif terbatas. Rahayu dan Santoso (2022) menyatakan bahwa analisis kebijakan publik di Indonesia sering kali belum terintegrasi dengan indikator pembangunan berkelanjutan secara sistemik. Inilah yang menjadi *research gap* dalam kajian kebijakan impor beras.

Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus memfokuskan analisis pada konteks daerah sentra produksi seperti Provinsi Jawa Tengah. Padahal, dampak kebijakan impor beras lebih terasa pada wilayah produsen dibandingkan wilayah konsumen. **OECD (2022)** menekankan pentingnya pendekatan teritorial dalam implementasi SDGs, di mana kebijakan nasional perlu dianalisis berdasarkan dampaknya pada wilayah tertentu. Dengan demikian, kajian kebijakan impor beras di Jawa Tengah menjadi relevan untuk memahami dinamika implementasi kebijakan di tingkat daerah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi apakah kebijakan impor beras telah selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau justru berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem pangan nasional. Analisis dalam kerangka SDGs memungkinkan penilaian kebijakan secara multidimensional, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan keberlanjutan produksi pertanian. **Stevenson et al. (2020)** menegaskan bahwa kebijakan publik berbasis keberlanjutan memerlukan evaluasi komprehensif yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi secara simultan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan impor beras di Indonesia dalam kerangka SDGs dengan fokus pada implikasinya di Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu sentra produksi padi nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian kebijakan pangan berkelanjutan serta rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan impor yang lebih adaptif, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan (policy analysis) untuk mengkaji kebijakan impor beras di Indonesia dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), dengan fokus wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu sentra produksi padi nasional. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai substansi kebijakan, proses implementasi, serta implikasinya terhadap dimensi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di tingkat daerah.

Data penelitian diperoleh melalui analisis dokumen terhadap regulasi dan kebijakan terkait impor beras (peraturan kementerian, dokumen perencanaan pembangunan, laporan SDGs, serta data produksi dan impor beras), serta didukung oleh wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposive, seperti perwakilan dinas pertanian, dinas perdagangan, akademisi, serta perwakilan petani di Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder juga diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, dan laporan pembangunan berkelanjutan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik dengan mengacu pada indikator SDGs, khususnya SDG 2 (*Zero Hunger*), SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), dan SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*). Proses analisis meliputi reduksi data, kategorisasi berdasarkan dimensi keberlanjutan, interpretasi kebijakan, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan dokumen, serta pengecekan silang antara data kebijakan dan temuan lapangan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif mengenai keselarasan kebijakan impor beras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan implementasinya di Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Substansi dan arah kebijakan impor beras di Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (SDGs)

Berdasarkan hasil analisis dokumen kebijakan nasional, substansi kebijakan impor beras di Indonesia secara formal diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Regulasi terkait impor beras umumnya menempatkan impor sebagai instrumen kebijakan jangka pendek ketika terjadi defisit produksi domestik, kenaikan harga yang signifikan, atau gangguan distribusi akibat faktor eksternal seperti perubahan iklim dan krisis global. Dalam kerangka normatif, kebijakan ini didasarkan pada prinsip stabilisasi pangan dan perlindungan konsumen.

Dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2 (Zero Hunger), kebijakan impor beras dapat dipahami sebagai upaya menjamin ketersediaan dan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat. **United Nations (2022)** menegaskan bahwa ketahanan pangan mencakup dimensi ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan analisis isi terhadap dokumen kebijakan, pemerintah menekankan aspek stabilitas pasokan dan harga sebagai prioritas utama, terutama dalam situasi produksi domestik yang menurun akibat anomali cuaca atau gangguan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan impor beras secara substansial berorientasi pada stabilitas jangka pendek untuk memenuhi indikator ketersediaan pangan.

Namun demikian, jika dianalisis lebih lanjut dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, terdapat dimensi yang belum sepenuhnya terintegrasi. SDGs tidak hanya menekankan pemenuhan kebutuhan pangan saat ini, tetapi juga keberlanjutan sistem produksi pangan jangka panjang. **Sachs et al. (2023)** menyatakan bahwa kebijakan pangan yang berkelanjutan harus memperkuat kapasitas produksi domestik dan ketahanan petani sebagai bagian dari sistem pangan yang resilien. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ahli kebijakan dan perwakilan petani di Jawa Tengah, ditemukan bahwa kebijakan impor beras sering kali berdampak pada penurunan harga gabah di tingkat petani ketika waktu impor tidak sinkron dengan musim panen domestik. Kondisi ini berpotensi melemahkan insentif produksi jangka panjang dan memengaruhi kesejahteraan petani.

Dalam konteks SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), kebijakan impor beras perlu dianalisis dari sisi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa meskipun impor dapat menekan inflasi pangan dan menjaga stabilitas ekonomi makro, dampaknya terhadap petani kecil belum sepenuhnya diperhitungkan secara sistemik. **Fauzi dan Oxtavianus (2021)** menekankan bahwa keberlanjutan ekonomi pedesaan sangat bergantung pada perlindungan harga dan kepastian pasar bagi petani. Jika kebijakan impor dilakukan tanpa koordinasi yang tepat dengan musim panen dan produksi domestik, maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan struktural dalam sistem pertanian.

Selain itu, dalam perspektif SDG 12 (Responsible Consumption and Production), arah kebijakan impor beras belum sepenuhnya mencerminkan prinsip konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pendekatan keberlanjutan menghendaki penguatan produksi lokal dan efisiensi rantai pasok domestik sebelum memutuskan opsi impor. **OECD (2022)** menegaskan bahwa sistem pangan berkelanjutan harus memprioritaskan optimalisasi produksi domestik serta meminimalkan ketergantungan eksternal yang berlebihan. Berdasarkan analisis dokumen, kebijakan impor beras masih lebih banyak berfokus pada mekanisme stabilisasi pasar dibandingkan strategi jangka panjang penguatan produktivitas dan diversifikasi pangan lokal.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa arah kebijakan impor beras cenderung responsif dan situasional, bukan berbasis perencanaan keberlanjutan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, kebijakan impor diputuskan berdasarkan proyeksi defisit

produksi atau tekanan inflasi tanpa disertai peta jalan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan. **Stevenson et al. (2020)** menyatakan bahwa kebijakan publik berbasis keberlanjutan harus mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi secara simultan, bukan hanya mempertimbangkan stabilitas ekonomi jangka pendek.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa substansi kebijakan impor beras di Indonesia telah selaras dengan sebagian indikator SDGs, khususnya dalam aspek stabilitas pasokan dan perlindungan konsumen. Namun, integrasi prinsip keberlanjutan dalam arti yang lebih komprehensif termasuk penguatan kapasitas produksi domestik, perlindungan petani, dan sistem pangan resilien masih memerlukan penguatan. Kebijakan impor beras perlu diarahkan tidak hanya sebagai instrumen stabilisasi pasar, tetapi juga sebagai bagian dari strategi besar pembangunan pertanian berkelanjutan yang terintegrasi dengan agenda SDGs.

2. Implementasi kebijakan impor beras di Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah sentra produksi padi

Bagian ini menyajikan hasil analisis implementasi kebijakan impor beras di Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu sentra produksi padi nasional. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan teknik content analysis terhadap dokumen kebijakan serta wawancara dengan pemangku kepentingan daerah. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana kebijakan impor beras yang ditetapkan di tingkat nasional diimplementasikan dan berdampak pada wilayah produsen, serta sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kerangka SDGs.

Sebagai provinsi dengan kontribusi produksi padi terbesar di Indonesia, Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam sistem pangan nasional. Oleh karena itu, kebijakan impor beras yang bertujuan menjaga stabilitas pasokan nasional tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap petani dan sistem produksi di wilayah ini.

a) Posisi Strategis Jawa Tengah dalam Sistem Pangan Nasional

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (**BPS, 2023**), Jawa Tengah merupakan salah satu dari tiga provinsi penyumbang produksi padi terbesar di Indonesia. Produksi gabah kering giling (GKG) dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kontribusi signifikan terhadap ketersediaan beras nasional.

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi GKG (Ton)	Catatan
2021	±1,67 juta Ha	±9,62 juta ton	Stabil
2022	±1,62 juta Ha	±9,34 juta ton	Penurunan ringan
2023	±1,55 juta Ha	±8,90 juta ton	Terdampak El Niño

Tabel 1. Produksi Padi Provinsi Jawa Tengah (2021–2023)

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023 (diolah)

Penurunan produksi pada 2023 akibat fenomena El Niño memperlihatkan kerentanan sistem produksi domestik terhadap perubahan iklim. Dalam konteks SDG 2 (*Zero Hunger*), kondisi ini menjadi dasar argumentatif bagi pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan impor guna menjaga stabilitas pasokan dan mencegah lonjakan harga. Namun, sebagai daerah produsen, Jawa Tengah juga memiliki kepentingan untuk menjaga keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani.

b) Mekanisme Implementasi Kebijakan Impor di Tingkat Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan impor beras bersifat sentralistik, di mana keputusan volume dan waktu impor ditentukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan dilaksanakan oleh Perum Bulog. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan

kebijakan impor, tetapi berperan dalam penyediaan data produksi serta monitoring harga di tingkat petani.

Implementasi kebijakan impor di daerah lebih terlihat dalam aspek distribusi dan stabilisasi harga pasar. Ketika pasokan domestik menurun dan harga beras meningkat, distribusi beras impor melalui Bulog membantu menekan inflasi pangan. Dalam perspektif makroekonomi, kebijakan ini sejalan dengan prinsip stabilitas ekonomi yang berkaitan dengan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*).

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan adanya persoalan sinkronisasi waktu impor dengan musim panen. Beberapa petani menyatakan bahwa impor yang dilakukan berdekatan dengan panen raya menyebabkan harga gabah di tingkat petani tidak mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mempertimbangkan siklus produksi lokal sebagai bagian dari sistem pangan berkelanjutan.

c) Dampak terhadap Harga dan Kesejahteraan Petani

Harga gabah merupakan indikator penting dalam menilai dampak kebijakan impor di daerah produsen. Data **BPS (2023)** menunjukkan fluktuasi harga gabah di Jawa Tengah selama periode 2022–2023.

Tahun	Harga Rata-rata (Rp/Kg)	Keterangan
2022	±5.100	Stabil
2023	±5.300	Fluktuatif

Tabel 2. Rata-rata Harga Gabah Petani Jawa Tengah (2022–2023)

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023 (diolah)

Secara agregat, harga menunjukkan tren kenaikan moderat. Namun, wawancara lapangan mengungkapkan bahwa kenaikan harga tersebut tidak sepenuhnya mengimbangi peningkatan biaya produksi, seperti pupuk, benih, dan tenaga kerja. Dengan demikian, margin keuntungan petani tetap tertekan.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kebijakan pangan tidak hanya bertujuan menjaga harga konsumen tetap stabil, tetapi juga memastikan kesejahteraan produsen sebagai bagian dari sistem ekonomi yang inklusif (**Sachs et al., 2023**). Jika kebijakan impor lebih dominan berorientasi pada stabilisasi harga konsumen tanpa penguatan perlindungan harga petani, maka keseimbangan antara dimensi sosial dan ekonomi dalam SDGs menjadi kurang optimal.

d) Analisis dalam Kerangka SDGs

Jika dianalisis secara integratif, implementasi kebijakan impor beras di Jawa Tengah menunjukkan beberapa temuan penting:

- 1) Selaras dengan SDG 2 dalam aspek stabilitas pasokan, terutama saat produksi domestik menurun.
- 2) Belum sepenuhnya selaras dengan SDG 8, karena perlindungan terhadap pendapatan petani belum optimal.
- 3) Kurang mendukung SDG 12, karena impor belum sepenuhnya ditempatkan sebagai opsi terakhir setelah optimalisasi produksi lokal.

OECD (2022) menegaskan bahwa sistem pangan berkelanjutan harus memperkuat produksi domestik dan mengurangi ketergantungan struktural terhadap pasar internasional. Dalam konteks Jawa Tengah, sebagai sentra produksi,

kebijakan impor idealnya diiringi dengan strategi peningkatan produktivitas, subsidi input pertanian, dan perlindungan harga dasar yang konsisten.

Implementasi kebijakan impor beras di Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan adanya dilema antara stabilitas nasional dan keberlanjutan lokal. Di satu sisi, impor beras berfungsi sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan pengendalian inflasi pangan. Di sisi lain, kebijakan tersebut dapat menimbulkan tekanan terhadap harga gabah di tingkat petani jika tidak disinkronkan dengan siklus produksi daerah.

Sebagai sentra produksi padi, Jawa Tengah memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis wilayah (*territorial approach*), di mana kebijakan impor nasional mempertimbangkan dinamika produksi dan kesejahteraan petani lokal. Tanpa integrasi tersebut, kebijakan impor beras berpotensi menghambat upaya transformasi sistem pangan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam SDGs.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan impor beras di Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu sentra produksi padi nasional menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berfungsi penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan harga beras di tingkat konsumen, terutama ketika terjadi penurunan produksi akibat faktor iklim dan gangguan pasokan. Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), kebijakan ini relatif selaras dengan tujuan SDG 2 (*Zero Hunger*) karena mendukung ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat. Secara makro, impor beras juga berkontribusi terhadap stabilitas inflasi pangan yang berkaitan dengan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*).

Namun demikian, dari perspektif keberlanjutan jangka panjang, implementasi kebijakan impor beras di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal sinkronisasi waktu impor dengan musim panen serta perlindungan kesejahteraan petani sebagai produsen utama. Kebijakan yang lebih berorientasi pada stabilisasi konsumen belum sepenuhnya diimbangi dengan strategi penguatan produksi domestik dan perlindungan harga gabah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis wilayah agar stabilitas nasional dan keberlanjutan sistem pangan lokal dapat tercapai secara seimbang dan berkelanjutan.

Referensi

- Anderson, K., & Strutt, A. (2021). Food security policy options in developing countries. *World Economy*, 44(6), 1523–1542.
- Arifin, B. (2020). *Ekonomi politik pangan dan pertanian*. IPB Press.
- Badan Pangan Nasional. (2023). *Laporan kinerja sektor pangan nasional 2023*. Bapanas.
- Bappenas. (2023). *Indonesia voluntary national review on the Sustainable Development Goals*. Kementerian PPN/Bappenas.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Jawa Tengah dalam angka 2023*. BPS Jawa Tengah.
- Clapp, J. (2021). Food self-sufficiency and trade: Policy implications for food security. *Global Food Security*, 28, 100512.

- FAO. (2022). *The state of food security and nutrition in the world 2022*. Food and Agriculture Organization.
- FAO. (2023). *The state of agricultural commodity markets 2023*. FAO.
- Garnett, T., Benton, T., & Godfray, C. (2021). Sustainable intensification in agriculture. *Nature Food*, 2(3), 152–158.
- Hapsari, I., & Wibowo, A. (2022). Dampak kebijakan impor beras terhadap stabilitas harga gabah. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 10(2), 89–101.
- Hertel, T., & Baldos, U. (2021). Global food security and trade reform. *Food Policy*, 102, 102047.
- International Food Policy Research Institute. (2022). *Global food policy report 2022*. IFPRI.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2024). *Outlook komoditas padi 2024*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Laborde, D., Martin, W., & Vos, R. (2021). Impacts of trade disruptions on global food security. *American Journal of Agricultural Economics*, 103(4), 1185–1201.
- Nuryanti, S., & Swastika, D. (2021). Ketahanan pangan dan kebijakan perdagangan beras di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 39(1), 1–15.
- OECD & FAO. (2023). *OECD-FAO agricultural outlook 2023–2032*. OECD Publishing.
- Prabowo, D., & Siregar, H. (2022). Evaluasi kebijakan stabilisasi harga beras di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 17(1), 45–59.
- Rizki, M., & Kurniawati, E. (2024). Kebijakan impor beras dan implikasinya terhadap petani padi di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 12(1), 77–92.
- Setiawan, B., & Hadi, P. (2023). Integrasi SDGs dalam kebijakan pangan nasional. *Jurnal Pembangunan Nasional*, 8(2), 134–148.
- Suryana, A., & Agustian, A. (2020). Sistem pangan nasional dan tantangan keberlanjutan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 101–114.
- Timmer, C. P. (2022). Food price stabilization and economic development. *Asian Development Review*, 39(1), 1–25.
- World Trade Organization. (2023). *World trade statistical review 2023*. WTO Publications.